

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Bimo Walgito. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Burhanuddin S. 2012. *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. MedPress Digital. Yogyakarta.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Transmedia Pustaka. Jakarta.
- Herlina Manullang. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. UHM Press. Medan.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kaelany HD. 1992. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Karto Manalu. 2021. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. CV Azka Pustaka. Pasaman Barat.
- Moh. Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Muhammad Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*. Prenada Media. Jakarta.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Siska Lus Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung.

- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. UMM Press. Malang.
- Wahyuno Darmabrata. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Rizkita. Jakarta.
- Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Teras. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.

#### **JURNAL:**

- Ady Supryadi dan Fitriani Amalia. "Kedudukan Peraturan Menteri di Tinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *UnizarLawReview*. Volume 4 Issue 2. Desember 2021.
- Dinda Ediningsih Dwi Utami. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3.2. 2022. 228-245.
- Dwi Putra Jaya. "Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2 No.2. 2017.
- Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat dan Serena Ghean Niagara. "Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Bhakti Hukum, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1, Nomor 1. Januari 2022.
- Kamarullah dan Mawardi. "Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011". *NPM*: A21211006.
- Putu Bhaskara Perwira Negara, Ketut Sudiatmaka dan Komang Febrinayanti Dantes. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.

- Rihlatul Khoiriyah. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri". *Sawwal: Jurnal Studi Gender*. 12(3).
- Robiati Citra Dira. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak". *Governance, Journal S-1 Ilmu Pemerintahan*. Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2017.
- Samuji. "Implikasi Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974". *Jurnal Paradigma*. Volume 2. Nomor 1. November 2015.
- Siti Yuli Astuty. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". *Welfare StatE*. Volume 2, Nomor 1, 2013.
- Sukardi Paraga. 2019. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)". *JURNAL PENDAIS*, Volume 1 No. 2.

#### **SKRIPSI:**

- A. Hamid S. Attamimmi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI*. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nanda Himmatul Ulya. 2013. *Kedudukan dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- M Nazer. 2006. *Studi Wiwaha Dalam Agama Hindu Bali*. Skripsi. Sarjana Ushuluddin. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Noorhafizah BT Baharin. 2010. *Pernikahan Dalam Agama Islam Dan Citra Wiwaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu (Suatu Studi Komperatif)*. Skripsi. Sarjana Ushuluddin. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

#### **KAMUS:**

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

**PUTUSAN:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2012.

**INTERNET:**

[https://www.youtube.com/watch?v=YI85TjU64RI&list=PLU\\_v5AGIJ0u52dE\\_JGmVZymRLZDJHV4csb&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=YI85TjU64RI&list=PLU_v5AGIJ0u52dE_JGmVZymRLZDJHV4csb&index=3) diakses pada 24 Mei 2022 pukul 19:42 WITA.

# LAMPIRAN